

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang menganut asas otonomi daerah. Sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah yang luas, dalam penyelenggaraan pemerintahannya Indonesia dibagi atas daerah-daerah dan setiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban daerah adalah untuk mengatur sendiri urusan pemerintahannya agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014.

Untuk menjalankan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya, pemerintah daerah membutuhkan sumber penerimaan. Oleh karena itu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah. Dengan keberagaman kondisi di masing-masing daerah, pemerintah daerah dituntut dapat memanfaatkan sumber penerimaan daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki sehingga dapat mengembangkan potensi yang ada di masing-masing daerah. Sumber penerimaan yang didapat oleh pemerintahan daerah diharapkan bisa digunakan dengan baik agar daerah

tersebut mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyat didaerahnya.

Kota Batu yang merupakan daerah otonomi yang baru terbentuk tidak luput juga dalam penerapan konsep desentralisasi sebagaimana daerah-daerah yang lain. Sehingga pemerintahan Kota Batu juga diberikan hak dan kewajiban untuk mengatur sendiri daerah pemerintahannya dengan tujuan mensejahterakan masyarakat. Untuk menjalankan wewenang yang telah dilimpahkan oleh pemerintah pusat, pemerintah Kota Batu memerlukan sumber pendanaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah.

Batu merupakan salah satu Kota yang terletak di provinsi Jawa Timur. Sebelum tahun 2001 Kota Batu adalah bagian dari Kabupaten Malang, kemudian ditetapkan menjadi kota administratif pada Maret 1993. Pada tanggal 17 Oktober 2001, Batu ditetapkan sebagai kota otonom yang terpisah dari kabupaten Malang. Batu memiliki luas wilayah 202,30km² dengan memiliki ketinggian 700-1.700 meter di atas permukaan laut. Kota Batu terdiri dari tiga kecamatan yakni Batu, Bumiaji, dan Junrejo. Pariwisata di kota Batu merupakan salah satu yang terkenal di Indonesia bersamaan dengan Bali dan Yogyakarta.²

Kota Batu dikenal sebagai Kota Wisata, maka pemerintahan Kota Batu perlu memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari potensi wisata yang dimiliki, utamanya dari Pajak Daerah sebagai sumber utama

²Indah Puspitasari, Moh. Saleh, dan Duwi Yunitasari, Analisis Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu Periode Tahun 2011-2015, *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, Vol 5, No. 1. 2018, 11-15.

pendanaan pemerintah daerah. Meningkatnya popularitas Kota Batu sebagai Kota wisata.

Pengembangan pariwisata merupakan peran yang sangat penting bagi pembangunan suatu wilayah. Dengan adanya berbagai kegiatan pariwisata maka daerah-daerah yang memiliki potensi dasar pariwisata akan dapat lebih berkembang dan maju. Selain itu, pariwisata di beberapa daerah dapat memberikan dampak positif dalam perekonomiannya terutama dalam pemasukan devisa. Pariwisata memiliki peran penting dan memiliki dampak positif terhadap pendapatan negara dan daerah. Adanya berbagai misi kepariwisataan, maka daerah yang memiliki potensi dasar pariwisata cenderung mengembangkan potensi daerah yang ada sehingga diharapkan mampumenarik wisatawan dalam jumlah besar.³

Akar ekonomi pariwisata di daerah Batu dimulai sejak Masa Kolonial. Taman Rekreasi Selecta yang didirikan oleh seorang Belanda bernama Royter Dewvild pada 1928 sering kali dilambangkan sebagai pembuka pintu kepariwisataan di Batu. Tempat wisata dengan luas 20 ha itu terletak di Tulungrejo, pada tempat yang berpemandangan sangat indah, yakni antara lembah Gunung Anjasmoro dan Gunung Welirang.⁴ Ketika wilayah Batu Utara menjadi sentral perkebunan, Selecta seolah menjadi mahkota bagi perkebunan yang luas tersebut. Kala berkunjung ke Selecta tak ubahnya dengan berwisata kebun. Bangunan ini menyumbul di tengah

³ Imron Hanas, Nurhadi Sasmita, Mengembangkan Pariwisata Membangun Kota: Kota Batu, 2001-2012, *Artikel Ilmiah Mahasiswa 2014*, <https://repository.unej.ac.id>,

⁴ Dwi Cahyono, *Sejarah Daerah Batu: Rekontruksi Sosio-Budaya Lintas Masa*, (Batu: Jejak Kata Kita, 2011), 182.

hamparan kebun berhawa sejuk, yang sesekali berbalut embun, nuansa alam yang indah adalah faktor ekologis tersendiri. Bahkan ketenaran Selecta sempat mengalahkan nama Tulungrejo sebagai desa tempat Selecta berada.

Dengan meningkatnya kegiatan pariwisata, maka di beberapa sektor ikut mengalami perkembangan dan juga peningkatan. Ini adalah dampak dari kegiatan pariwisata di Kota Batu. Hal ini wajar, karena akan terdapat simbiosis mutualisme antara pariwisata dan sektor yang berada di daerah pariwisata. Berbicara mengenai pariwisata tentu tidak akan lepas dari pembahasan mengenai fasilitas pendukung kegiatan pariwisata itu sendiri. Fasilitas pendukung objek wisata tersebut berupa hotel, vila, rumah makan atau restoran dan akomodasi wisata lainnya. Keberadaan fasilitas tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, Usaha Pariwisata pasal 6, dijelaskan bahwa usaha pariwisata terdiri dari usaha daya tarik wisata, usaha kawasan pariwisata, usaha jasa transportasi wisata, usaha jasa perjalanan wisata, usaha jasa makanan dan minuman, usaha penyediaan akomodasi, usaha penyelenggaraan hiburan dan rekreasi, usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan intensif, konferensi dan pameran, usaha jasa informasi wisata, usaha jasa konsultan wisata dan usaha wisata tirta.

Sektor pariwisata yang berangsur-angsur meningkat di Kota Batu, mulai memberikan secercah harapan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Dari yang dibukukan pada Oktober lalu, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Batu mencatat perolehan pajak restoran sudah menyentuh pada angka

95,34 persen. Begitu juga dengan pajak hotel yang dibukukan sebesar 95,48 persen. Kemudian pajak hiburan sebesar 86,05 persen. Kepala Bidang Penagihan BKD Kota Batu Ismail Hasan mengatakan liburan panjang pada 28 Oktober hingga 1 November 2020 lalu cukup memberi dampak signifikan terhadap PAD dari sektor pariwisata. Rincian pendapatan dari sektor pariwisata yang dihimpun hingga akhir Oktober lalu. Perolehan pajak restoran yakni sebesar Rp 8,4 miliar dari target yang ditetapkan sebesar Rp 9,2 miliar.⁵

Pemerintah Kota Batu agar dapat berjalan baik sesuai program serta visi yang telah dibuat maka saat ini yang harus dilakukan adalah menjalin hubungan baik dengan para investor baik dalam maupun luar negeri yang menanamkan modal mereka pada industri pariwisata di Kota Batu. Hal tersebut dilakukan agar sektor pariwisata di Kota Batu dapat memberi kontribusi yang tinggi pada PAD Kota Batu dan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi di Kota Batu.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: “Pengaruh Pendapatan Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu Jawa Timur”.

⁵<https://nusadaily.com/regional/sektor-pariwisata-mulai-beri-dampak-positif-terhadap-pad-kota-batu.html> diakses tanggal 2 Juli 2021

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat Pendapatan Sektor Pariwisata dan Pendapatan Asli Daerah Kota Batu Jawa Timur?
2. Apakah ada Pengaruh Pendapatan Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu Jawa Timur?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka peneliti dapat memaparkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat Pendapatan Sektor Pariwisata dan Pendapatan Asli Daerah Kota Batu Jawa Timur.
2. Untuk menguji Pengaruh Pendapatan Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu Jawa Timur.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoretis, hasil kajian ini diharapkan bisa menambah khazanah ilmiah, terutama berkenaan dengan ekonomi pendapatan.
2. Kegunaan praktis
 - a. Bagi Kota Batu Jawa Timur

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai kontribusi dan penambahan wawasan dalam mengambil kebijakan tentang pengaruh

pendapatan sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah Kota Batu Jawa Timur.

b. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan koleksi penelitian dalam pendapatan yaitu pengaruh pendapatan sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dalam pengaruh pendapatan sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah Kota Batu Jawa Timur dan hendaknya faktor-faktor diluar variabel penelitian diteliti oleh peneliti selanjutnya.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari interpretasi yang salah dalam memahami judul skripsi “pengaruh pendapatan sektor pariwisata terhadap pendapatan asli daerah Kota Batu Jawa Timur” ini, perlu kiranya peneliti memberikan beberapa penegasan sebagai berikut:

1. Definisi Konseptual

- a. Pendapatan adalah hasil penjualan barang dan jasa yang dibebankan kepada langganan/mereka yang menerima.⁶ Pendapatan sektor pariwisata adalah hasil penjualan dari berbagai macam kegiatan

⁶ Sofyan Syafri Harahap, *Teori Akuntansi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001) 236.

wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.⁷

- b. Pendapatan asli daerah yaitu Penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸

2. Definisi Operasional

Penelitian yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu Jawa Timur” dilakukan untuk menguji pengaruh Pengaruh Pendapatan Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu Jawa Timur.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah penulisan dan pemahaman secara menyeluruh tentang skripsi ini, maka sistematika laporan dan pembahasannya disusun sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, Pada bab ini penulis membahas berbagai gambaran singkat untuk mencapai tujuan penulisan yang meliputi: latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, kegunaan penelitian, hipotesis penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang *Kepariwisata*.

⁸Ahmad Yani. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah DI Indonesia*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), 203.

BAB II: Kajian Pustaka, Pada bab ini membahas tentang pendapatan sektor pariwisata dan pendapatan asli daerah, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka konseptual dan hipotesis penelitian.

BAB III: Metode Penelitian, pada bab ini rancangan penelitian, variabel penelitian, populasi sampel dan sampling penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV: Hasil Penelitian, mendeskripsikan deskripsi variabel penelitian, analisis data dan pengujian hipotesis penelitian.

BAB V Pembahasan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dikaitkan antara teori-teori dengan hasil penelitian, serta menafsirkan dan menjelaskan hasil penelitian.

BAB VI: Penutup, Bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan dan penelitian dalam penulisan skripsi ini, yaitu menyimpulkan hasil penelitian secara menyeluruh. Kemudian dilanjutkan dengan memberikan saran-saran sebagai perbaikan dari segala kekurangan.